

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan *outcome* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan ^{kurikulum}, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.

Melalui perencanaan strategis di bidang pendidikan, lembaga pendidikan mampu menyiapkan *output*. Berdasarkan jumlah dana BOS tersebut, pada masing-masing sekolah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan dana pendidikan tersebut berdasarkan pada petunjuk teknis untuk mencapai visi dan misi sekolah. Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal.

Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan

perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Fasilitas pembelajaran merupakan faktor lain yang mempengaruhi mutu sekolah. Dalam pencapaian mutu sekolah, fasilitas pembelajaran merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan.

Pemanfaatan fasilitas pembelajaran perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari pemborosan dan tidak tepatnya pemanfaatan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsipnya agar peningkatan mutu sekolah dapat tercapai. Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang tersendat, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik (*good governance*), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan.

Jika memandang dari sisi manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran, beberapa kendala mengenai perencanaan fasilitas harus dapat bekerjasama serta adanya unsur-unsur manajemen seperti: manusia, uang, material, mesin, metode, dan sebagaimana yang diperlukan dalam menggerakkan kegiatan organisasi. Di kalangan para ahli belum terdapat suatu kesepakatan mengenai jumlah fungsifungsi manajemen. Kesepakatan yang

telah dicapai yaitu pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi manajemen itu dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi utama yaitu : 1. Fungsi organisasi, merupakan fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh manajemen, ketidakmampuan menjalankan fungsi tersebut akan mengakibatkan lamban atau matinya organisasi. 2. Fungsi pelengkap, meskipun tidak mutlak harus dijalankan oleh organisasi, namun sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Penggunaan pembiayaan pendidikan diorientasikan kepala pembiayaan operasional pendidikan yang mendukung pada peningkatan mutu pendidikan yang tepat sasaran dengan memenuhi sistem tata kelola manajemen keuangan sekolah harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki tiga tahapan penting yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan (budgeting), dan tahap pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau auditing. Dengan sistem manajemen pembiayaan pendidikan diharapkan mampu mendukung, menjamin pengembangan mutu dan kualitas pendidikan dan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990 yang merupakan implementasi perundangan yang mengatur pendidikan dasar di

Indonesia, maka salah satu bentuk pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program enam tahun adalah sekolah dasar (SD). Sekolah dasar dipandang sebagai satuan pendidikan yang eksistensinya paling urgen. Sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar, sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang paling urgen keberadaannya (Collier, dkk. 1971 dalam Bafadal, 1995). Dari peraturan pemerintah ini dapat diketahui dua hal paling urgen di dalamnya yaitu: pertama; melalui jenjang pendidikan dasar peserta didik dibekali kemampuan dasar yang akan sangat berguna dalam menopang jenjang pendidikan yang ditempuh di atasnya. Kedua; sekolah dasar merupakan satuan pendidikan yang menanamkan dasar-dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya.

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas dipaparkan peranan manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Apabila semua fungsi manajemen dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka pencapaian tujuan organisasi akan terlaksana dengan efektif dan efisien. Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan, karena biaya merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Semua kegiatan yang memberikan output yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan biaya. Begitu pula dengan pendidikan, dimana pendidikan yang merupakan salah satu bentuk investasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan biaya. Abdullah (1998:162) mengatakan bahwa secara teoritis, "Biaya adalah nilai besar dana yang perlu disediakan pada proyek kegiatan tertentu".

Biaya dalam kaitan ini adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dalam mencapai keuntungan. Konsep biaya tidak selalu identik dengan uang. Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. (Abdullah, 2008:31). Menurut Purwanto (2002:12), "Biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan yang diberikan untuk setiap kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan." Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis merumuskan bahwa biaya adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dalam bentuk sumber daya, untuk mendapatkan pengembalian berupa uang atau layanan dalam rangka pencapaian tujuan dari kegiatan tertentu. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber dananya tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuantujuannya (Zemelman, 1995). Senada disampaikan oleh Akbar (2009) mengenai efisiensi menyatakan bahwa efektifitas pendidikan menggambarkan tingkat kesesuaian antara jumlah keluaran yang dihasilkan dengan jumlah yang ditargetkan. Maka masalah efektifitas biaya pendidikan mempunyai kaitan langsung dengan upaya untuk mengetahui apakah sejumlah biaya tertentu dapat menghasilkan pendidikan yang telah ditentukan.

Konsep dasar manajemen pembiayaan pendidikan produktivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor manajemen pembiayaan.

Manajemen merupakan komponen utama dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa manajemen tidak melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan pelaksanaan dengan membentuk sistem. Sistem adalah, "Suatu jaringan kerja atau network yang terdiri dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain yang tergabung bersama-sama (untuk membentuk suatu kegiatan atau untuk mencapai sasaran spesifik". (Khairuddin, 2008). Sedangkan manajemen menurut Manullang (1997:48) adalah, "Seni dan ilmu pengetahuan, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu".

Kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki Sekolah Dasar menjadi isu penting yang tidak pernah ada henti-hentinya untuk melengkapi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, bahkan pemerintah telah mengeluarkan undang-undang pendidikan dan Permendiknas yang mengatur standar, khususnya berkaitan dengan problematik sarana dan prasarana.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media. Menurut E. Mulyasa, Sarana Pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar, seperti bangunan, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Astuti (2012) menilai bahwa partisipasi masyarakat secara total

merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, wajarlah manakala Astuti (2012) kembali mengemukakan, bahwa partisipasi edukatif perlu didesain sesuai kondisi dan potensi siswa, orang tua dan keluarga sebagai pedoman untuk mendorong keterlibatan anggota keluarga dalam proses pendidikan anak. Salah satu wujud konkrit secara formal yang diimplementasikan adalah dibentuknya komite sekolah.

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses belajar baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya fasilitas belajar yang memadai maka kelancaran dalam belajar akan dapat terwujud. Kaitannya dengan fasilitas belajar, Slameto (2003: 63) mengemukakan bahwa Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal makan, pakaian, perlindungan kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis-menulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai cukup uang. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fasilitas belajar erat kaitannya dengan kondisi ekonomi orang tua siswa. Dengan kondisi ekonomi orang tua yang baik, maka orang tua akan lebih mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan anaknya termasuk dalam hal penyediaan fasilitas belajar di rumah yang memadai. Begitu juga dengan pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, jika sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah

dalam melakukan kegiatan belajar. Sebagaimana dikemukakan oleh S. Nasution (2005: 76) bahwa: Untuk memperbaiki mutu pengajaran harus didukung oleh berbagai fasilitas, sumber belajar dan tenaga pembantu antara lain diperlukan sumber-sumber dan alat-alat yang cukup untuk memungkinkan murid belajar secara individual. Antara lain diperlukan sumber-sumber dan alat-alat yang cukup untuk memungkinkan murid belajar secara individual. Dengan demikian, adanya fasilitas belajar yang lengkap diharapkan akan terjadi perubahan, misalnya dengan sekolah menyediakan fasilitas belajar yang lengkap, siswa akan lebih bersemangat dalam belajar, siswa tidak perlu meminjam ataupun menggantungkan tugasnya pada teman, karena ia dapat mengerjakan tugasnya sendiri dengan bantuan fasilitas yang telah disediakan. Ketersediaan fasilitas belajar di sekolah yang lengkap dan memadai juga merupakan indikasi atau syarat menjadi sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif sendiri menurut Levine dalam Burhanuddin Tola dan Furqon (2008) dapat diartikan sebagai sekolah yang menunjukkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam menyelenggarakan proses belajarnya, dengan menunjukkan hasil belajar yang bermutu pada peserta didik sesuai dengan tugas pokoknya. Pada akhirnya konsep sekolah efektif ini berkaitan langsung dengan mutu kinerja sekolah. adanya fasilitas

Secara umum tujuan fasilitas pendidikan di sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional dibidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Agar tujuan dapat tercapai ada beberapa prinsip yang perlu

diperhatikan, yaitu pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu bahwa sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai oleh personel sekolah dalam rangka pencapaian tujuan proses belajar mengajar.

Dalam rangka mengatur substansi fasilitas atau sarana di sekolah digunakan suatu pendekatan administrative tertentu yang disebut juga manajemen sarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.

Penentuan sarana pendidikan sekolah juga harus mempertimbangkan siapa-siapa saja yang memfasilitasi atau membiayai pengadaan sarana tersebut. Pihak sekolah bisa mengajukan permohonan pengadaan sarana pendidikan kepada instansi atasan seperti kepada pemerintah melalui Disdikpora provinsi, kabupaten/kota, bisa juga kepada pihak komite sekolah mengajukan RAPBS (Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah) pada waktu awal tahun pelajaran atau mungkin sumbangan dari masyarakat. Apabila pengajuan pangadaan fasilitas pendidikan tersebut hanya sebagian yang disetujui, maka harus menentukan skala prioritas atau sarana yang paling penting dan mendesak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk memudahkan mengetahui fasilitas yang paling penting dan mendesak dalam keperluan pendidikan, maka pada daftar pengadaan sarana harus diurut dari

nomor terkecil untuk sarana/fasilitas yang paling penting atau mendesak kemudian diikuti fasilitas yang lain sesuai dengan tingkat kepentingan.

Terdapat beberapa permasalahan tentang aspek yang berkaitan dengan efektifitas pembelajaran, seperti sekolah akan bermutu baik jika dalam penyelenggaraan kegiatan belajarnya tidak hanya didukung oleh potensi siswa, kemampuan guru dalam mengajar ataupun oleh masyarakat dilingkungan sekolah, akan tetapi juga harus didukung adanya kelengkapan fasilitas belajar siswa yang memadai sehingga penggunaannya akan menunjang kemudahan siswa dalam kegiatan belajarnya. Hal ini penting untuk melihat kondisi pendidikan secara utuh, dari peranan masyarakat dan mutu bisa berbeda-beda sesuai dengan tujuan suatu kajian atau tinjauan. Jika proses pendidikan didukung oleh masyarakat dan berjalan dengan fasilitas pendidikan, maka terbuka peluang yang sangat besar untuk memperoleh efektifitas pembelajaran.

Mutu pendidikan diupayakan sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada standar yang dijadikan pagu (benchmark). Setiap sekolah/madrasah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan pagu itu. Acuan ini seharusnya bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses, maupun lulusannya. Apabila suatu sekolah/madrasah, misalnya telah mampu mencapai standar mutu yang bersifat nasional, diharapkan sekolah/madrasah tersebut secara bertahap mampu mencapai mutu yang kompetitif secara internasional. Jadi, pada dasarnya pagu mutu pendidikan nasional merupakan

acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan dan atau program pendidikan.

Sebagaimana diketahui, upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya ini diarahkan agar setiap lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan mutu layanannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan mutu layanan adalah jaminan bahwa proses penyelenggaraan pendidikan disekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula dengan yang diharapkan. Apabila setiap satuan pendidikan selalu berupaya untuk memberi jaminan mutu dan upaya ini secara nasional akan terus meningkat.

Peningkatan mutu pendidikan ini akan berdampak pada peningkatan mutu sumber daya manusia secara nasional. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai kesempatan dan tantangan, baik yang bersifat nasional maupun global, sedangkan berbagai kesempatan dan tantangan itu hanya dapat diraih dan dijawab apabila sumber daya manusia yang dimiliki bermutu tinggi. Berangkat dari pemikiran tersebut dan untuk dapat membandingkan serta memetakan mutu dari setiap satuan pendidikan, perlu dilakukan akreditasi bagi setiap lembaga dan program pendidikan. Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam menggunakan instrumen akreditasi yang komprehensif dan

dikembangkan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan, diharapkan profil mutu sekolah/madrasah dapat dipetakan untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah/madrasah oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah/madrasah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah/madrasah sebagai sebuah institusi belajar. Walaupun beragam perbedaan dimungkinkan terjadi antar sekolah/madrasah, tetapi sekolah/madrasah dievaluasi berdasarkan standar tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Akreditasi merupakan alat regulasi diri (*self-regulation*) agar sekolah/madrasah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi memiliki makna proses pendidikan

Di samping itu akreditasi juga merupakan penilaian hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah/madrasah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses akreditasi dalam makna proses adalah penilaian dan pengembangan mutu suatu sekolah/madrasah

secara berkelanjutan. Akreditasi dalam makna hasil menyatakan pengakuan bahwa suatu sekolah/madrasah telah memenuhi standar kelayakan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan otonomi pendidikan menuntut adanya perubahan dalam sistem evaluasi yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan dilakukan baik di tingkat satuan pendidikan maupun birokrasi pengelolaan. Pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari manajemen harus berjalan seimbang dengan fungsi manajemen lainnya agar dapat dicapai peningkatan kinerja satuan pendidikan secara optimal. Hal ini mendorong adanya pelaksanaan proses evaluasi yang lebih profesional, obyektif, jujur, dan transparan sebagai rangkaian dari pengawasan dan pembinaan atau pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang bermutu dan memberdayakan sekolah yang dievaluasi sehingga dihasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya pihak yang dievaluasi, administrator pendidikan, kepala sekolah, guru, atau peserta didik di dalam suatu satuan pendidikan akan merasakan bahwa kegiatan evaluasi dapat memberi informasi mengenai berbagai kelebihan dan kekurangan, serta memberikan arah yang jelas untuk mencapai mutu yang lebih baik. Untuk itu, evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif, serta

memotivasi peserta didik dan pengelola pendidikan untuk terus menerus berupaya meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran dan pendidikan.

Penjaminan mutu pendidikan (*Quality Assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu peneglolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Penjaminan mutu atau kualitas adalah seluruh rencana tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas (Elliot, 1993).

Standar mutu suatu produk diukur dengan kriteria sesuai spesifikasi, relevan dengan tujuan pembuatan dan penggunaan. Dengan mekanisme sistem penilaian yang dipandang efektif adalah suatu bahan yang terdapat pada kurikulum yang sudah dipelajari oleh siswa, bahan yang sudah diprogramkan dijadikan alat evaluasi, bahan tersebut tidak hanya memuat konsep *multiple choice, true or false, matching, completion*, atau *essay*. Namun punya esensi pendalaman materi dan tidak berupa soal yang jawabannya singkat. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang menentukan keberhasilan. Pengaturan proses belajar mengajar dan pengajaran (Djamarah, 2014). Mengukur kompetensi lulusan dibutuhkan alat evaluasi secara komprehensif, bagaimana kompetensi masing-masing siswa dikembangkan dengan pemenuhan pendidikan karakter. Sekolah memiliki mandat dalam me-manage proses pembelajaran aktif dengan menekankan dan memetakan kompetensi siswa. Di dalam Undang-undang (UU) Sisdiknas disebutkan bahwa kelulusan adalah hak prerogatif sekolah, sehingga ada lagi standarisasi oleh

Kemendikbud, oleh karena itu, perihal kelulusan dikembalikan ke sekolah agar sekolah lebih berdaulat. Hal ini sangat penting, perancangan standarisasi oleh sekolah memungkinkan adanya peningkatan secara gradual dan *incremental* adanya pemetaan kompetensi siswa dengan dunia luar.

Sasaran kualitas kompetensi lulusan didukung dengan karakter yang kuat, maka Sumber Daya manusia Indonesia mampu berkompetisi di era global. Karakter menjadi muatan dalam penyelenggaraan kebijakan sistem pendidikan. karena dinilai pendidikan karakter menjadi modal utama dalam membangun SDM yang kompetitif. Standar Kompetensi Lulusan dapat dilihat melalui pengetahuan, ketrampilan dan keahlian lulusan dari hasil tes/ujian kompetensi yang mendalam. Hasil *output* (kuantitatif), *outcome* (nilai) sebanding dengan kebutuhan lapangan kerja serta pengetahuan dan keahlian yang berperan positif di dunia kerja.

Inovasi dan karakter menjadi unsur penting dalam penilaian kompetensi lulusan. Kemendikbud menjadikan pendidikan karakter sebagai salah satu program utamanya, hal ini dikarenakan dengan karakter yang kuat itu menjadi modal sukses siswa di masa depan. Berdasarkan ulasan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Kontribusi Manajemen Pembiayaan dan Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Gugus III Purwosari Pasuruan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Gugus III Purwosari Pasuruan?
2. Apakah ada pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Gugus III Purwosari Pasuruan?
3. Apakah ada pengaruh Manajemen Pembiayaan dan Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Gugus III Purwosari Pasuruan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pengaruh Manajemen Pembiayaan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Gugus III Purwosari Pasuruan.
2. Untuk Mengetahui pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Gugus III Purwosari Pasuruan.
3. Untuk Mengetahui pengaruh Manajemen Pembiayaan dan Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah di Gugus III Purwosari Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri pada persoalan manajemen pembiayaan dan pemanfaatan fasilitas

pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah. Adapun manfaat/kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoretis: (a). Manfaat temuan yang bersifat substantif yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan terhadap peningkatan mutu sekolah, (b). Memberikan sumbangan pemikiran tentang pemanfaatan fasilitas pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah, (c). Sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah.
2. Manfaat Praktis: (a). Dapat memberikan pengetahuan dan memperluas pemahaman tentang manajemen pembiayaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah, (b). Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pendidikan di Gugus III Purwosari Pasuruan, (c). Dapat digunakan sebagai bahan empirik kontekstual tentang manajemen pembiayaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah.